

Analisis Sistem Upah Buruh Tani Di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Irsadul Fikri¹, Zuwardi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Email: irsadulf04@gmail.com¹, zuwardiyyzi8@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penundaan pembayaran upah buruh tani 2 bulan setelah pekerjaan selesai dan ada pemilik lahan membayar upah ke buruh tani sampai masa panen padi. dan yang dirasakan buruh tani Rendahnya upah buruh seringkali tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, sehingga kesejahteraan buruh tani sulit terpenuhi, pekerjaan bergantung kepada musiman sehingga Kondisi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan merusak martabat kemanusiaan buruh tani, yang seharusnya dijaga dalam perspektif ekonomi islam. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota karakteristik Berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Sistem pengupahan buruh tani di Nagari Taeh Baruah dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain sistem upah harian, sistem upah borongan, dan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah hasil panen. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan pembayaran upah oleh pemilik lahan, rendahnya nilai upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup, serta kurangnya kejelasan dan kesepakatan yang tertulis antara buruh tani dan pemilik lahan. Hal ini menyebabkan para buruh tani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, serta menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan seharusnya didasarkan pada prinsip (tauhid) mencerminkan keyakinan bahwa segala aktivitas ekonomi dilakukan sebagai pengabdian kepada Allah, prinsip (keadilan) upah diberikan sesuai beban kerja, tidak merugikan salah satu pihak, dilakukan transparan, prinsip (nubuwwah) pemilik lahan diharapkan meneladani akhlak Rasulullah SAW, prinsip (khalifah) pemerintah berperan menetapkan kebijakan pengupahan yang adil, pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan dan menciptakan sistem menjamin kesejahteraan, prinsip (tanggung jawab) seluruh pihak, baik pemilik lahan, buruh maupun pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan sistem pengupahan. Realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada kesejahteraan buruh tani serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Sistem Upah, Keadilan, Ekonomi Islam.

Abstract

This research is motivated by the practice of delayed wage payments to agricultural laborers, with some landowners paying wages up to two months after the work is completed, or even waiting until the rice harvest. Agricultural laborers often experience low wages that are not in line with the rising cost of living, making it difficult for them to achieve a decent standard of living. Their work is seasonal, which contributes to economic inequality and undermines the human dignity of agricultural laborers something that should be preserved according to the perspective of Islamic economics. The purpose of this research is to examine the Islamic economic perspective on the wage system for agricultural laborers in Nagari Taeh Baruah, Payakumbuh District, Lima Puluh Kota Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the research in Nagari Taeh Baruah show that, from the perspective of Islamic economics, the wage system for agricultural laborers is implemented through various methods, including daily wages, contract-based wages, and profit-sharing based on the harvest yield. However, in practice, several issues were identified, such as delayed payments by landowners, low wages that do not match the cost of living, and a lack of clear, written agreements between laborers and landowners. These conditions make it difficult for agricultural laborers to meet their basic daily needs and contribute to social and economic inequality. From the perspective of Islamic economics, the wage system should be based on the following principles: Tauhid (Monotheism): Economic activities should be carried out as an act of devotion to Allah. Justice: Wages should be paid fairly based on workload, without harming either party, and with transparency. Nubuwwah (Prophethood): Landowners are expected to emulate the ethical conduct of the Prophet Muhammad (PBUH). Khilafah (Stewardship): The government plays a role in establishing fair wage policies, monitoring labor practices, and creating systems that ensure welfare. Responsibility: All parties landowners, laborers, and the government bear moral and social responsibility in managing the wage system. The reality found in the field shows that the wage system currently applied does not fully align with these principles. Therefore, there is a need for improvements in the system to better support the welfare of agricultural laborers and ensure alignment with Islamic values.

Keywords: Wage System, Fair , Islamic Economic.

PENDAHULUAN

Islam selaku way of life menata seluruh pandangan kehidupan orang, bagus kepercayaan, ibadah, adab, ataupun Mu' amalah atas cara komprehensif alhasil wajib dilaksanakan atas cara kaffah. Ibadah ialah alat buat menegaskan kewajiban orang atas

cara berkepanjangan selaku khalifah- Nya di wajah alam ini. Dalam amatan fiqih ikatan antara sesama orang ialah atas bermuamalah akan dicoba supaya kebutuhannya bisa terkabul. Mu' amalah yakni sesuatu aktivitas orang akan berhubungan atas harta serta kegiatan ekonomi ataupun bidang usaha akan dilaksanakan memakai akad bagus atas

cara langsung ataupun tidak pula dapat berbentuk benda ataupun pelayanan, semacam jual beli, sewa- menyewa, pinjam-meminjam, hutang- piutang, agun serta serupanya(Baiti Nurjanah, 2021).

Profesi selaku pegawai bercocok tanam Pegawai bercocok tanam merupakan seorang akan bertugas di tanah kepunyaan orang lain buat memperoleh hasil ataupun imbalan atas owner tanah. Pekerjaan akan dilakukan pegawai bercocok tanam merupakan semacam mensterilkan, memasak serta menuai tanah ataupun ladang dimana pegawai bercocok tanam bertugas. Bertugas Pekerjaanpegawai bercocok tanam umumnya tidak diperlukan lalu menembus disetiap harinya alhasil mereka cuma tergantung atas keinginan para orang tani owner tanah buat memakai jasanya. Alhasil buat pegawai bercocok tanam, pijakan mencari nafkah atas metode pengurusan tanah serta penyewaan tanah kepunyaan orang lain telah ditatap tidak lagi membuatkan profit akan ekonomis Imbalan dimaksud selaku hak pekerja akan diperoleh serta diklaim dalam wujud duit atas balasan atas wiraswasta atas pekerja atas sesuatu profesi ataupun pelayanan akan sudah ataupun hendak dicoba, diresmikan serta dibayarkan buat sesuatu akad kegiatan, perjanjian, ataupun peraturan perundang-undangan, tercantum bantuan buat pekerja

serta keluarganya(PP nomor 5 Tahun 2003 mengenai UMR).

Atas cara biasa dalam determinasi Al-Qur' an akan terdapat ketergantungan atas determinasi imbalan bisa ditemukan dalam sabda Allah:

إِنَّا لَهَيَّامُرٌ بِالْعَدْلِوَ الْإِحْسَانِوَ إِنَّا نَذِذُ الْفَرْبِئُوهَبِعِنَا الْفَحْشَاءَ
وَالْمُنْكَرَ وَابْتَغِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Maksudnya:“ Sebetulnya Allah memerintahkan legal seimbang, melakukan kebajikan, serta membuatkan dorongan atas saudara. Ia(pula) mencegah aksi keji, kemungkaran, serta konflik. Ia berikan pelajaran keatasmu supaya kalian senantiasa ingat”(QS. An- nahl: 90)

Bila buatan ini berhubungan atas akad kegiatan, hingga bisa dikemukakan kalau Allah SWT menginstruksikan atas donatur profesi(tuan) buat legal seimbang, melakukan bagus serta ikhlas hati atas para pekerjaanya, Supaya orang itu janganlah hingga berperan semanya, legal menyiksa satu serupa lain, hingga hukum Islam menata perikehidupan orang atas cara global, melingkupi seluruh berbagai aspeknya, di antara lain menata pergaulan hidup tiap orang dalam bermuamalah di antara lain merupakan sistem upah- mengupah(Yetniwati, 2020)

Imbalan buat metode pembayarannya atas pegawai bercocok tanam, Selanjutnya ini ialah uraian akan lebih rinci hal mengenai sistem imbalan pegawai bercocok tanam:

1. Sistem Imbalan Harian

Imbalan setiap hari umumnya diberlakukan buat profesi akan karakternya temporer ataupun akan bisa dicoba oleh pekerja tidak senantiasa. Misalnya profesi gedung, pekerja panen pertanian serta perkebunan. Dalam sistem imbalan setiap hari, atas cara teoritis tingkatan imbalan diperhitungkan bersumber atas atas umumnya daya produksi daya kegiatan/hari.(Endah Masrunik, 2020)

2. Sistem Imbalan Borongan

Besarnya imbalan borongan biasanya amat terkait atas hasil kegiatan pegawai bercocok tanam. Terus menjadi besar daya produksi kegiatan, atas cara teoritis terus menjadi besar pula imbalan akan diperoleh pegawai bercocok tanam. Alterasi daya produksi dampingi orang pegawai bercocok tanam ataupun golongan pegawai bercocok tanam ialah pembatas imbalan kegiatan pegawai bercocok tanam.

3. Imbalan bawon

Imbalan bawon ialah sistem pengupahan kegiatan atas pertanian

antah akan dipraktikkan atas cara bebuyutan serta bersumber atas Kerutinan. Orang tani eksekutor kebun hendak melaksanakan sesuatu upaya khusus dalam cara pertanian tumbuhan antah tanpa menemukan imbalan langsung, namun berkuasa memperoleh beberapa hasil atas panen sehabis diserahkan peluang buat turut dalam pemanenan antah.

Salah satu perihal akan menarik buat diulas ialah hal bentuk imbalan pegawai bercocok tanam akan terletak di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 5 Pulu Kota, akan dimana beberapa besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya atas zona pertanian serta perkebunan. Di wilayah Nagari Taeh Baruah mempunyai tanah akan produktif akan sesuai dipakai selaku tanah bermacam barang pertanian, semacam antah, jagung, serta sayur-mayur.

Tanah persawahan ialah salah satu kebanyakan mata pencarian warga di Nagari Taeh Baruah. Atas biasanya warga di Nagari Taeh Baruah mempunyai tanah pertanian ialah kebun akan besar, alhasil warga menginginkan daya kegiatan buat mengatur kebun itu. Selanjutnya

jumlah pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah.

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2021	145	16	161
2022	172	18	190
2023	170	18	188
2024	169	17	186

Sumber: data wali nagari

Atas masa pra tabur aktivitas membajak kebun ialah aktivitas jenjang dini akan amat berarti dalam pengerjaan tanah pertanian, dalam budidaya antah. Cara membajak kebun diawali sehabis tanah kebun diairi sampai lumayan berlumpur supaya tanah jadi lunak serta gampang diolah, para pegawai bercocok tanam membajak kebun memakai perlengkapan akan telah modern ialah atas mesin traktor. Membajak dicoba atas metode memusatkan perlengkapan meniru buat membelah serta membalik tanah sampai buatan dasar naik ke atas, cara berikutnya menggeledak kebun atas cara

memusnahkan bongkahan tanah akan bergumpalan jadi tanah halus

akan bermaksud buat memadamkan gulma dan membenarkan bentuk tanah supaya lebih sedia lagi menyambut bibit antah. Sehabis membajak kebun berakhir, dilanjutkan atas cara memaras tanah atas suatu kediaman akan panjang dekat 3–4 m, buat memaras dataran kebun supaya air bisa menggenang secara menyeluruh. Semua

aktivitas cara membajak kebun menyantap durasi sebuatan jam sampai sebuatan hari terkait besar tanah akan dibajak.

Pegawai bercocok tanam mengawali aktivitas membajak kebun atas jam 08. 00 pagi hingga jam 12. 00 siang, pegawai bercocok tanam bertugas membajak kebun maksimum 5 jam dalam satu hari. Aplikasi bentuk hitungan imbalan pegawai bercocok tanam membajak kebun di nagari taeh baruah

terbentuknya perbandingan penentuan imbalan ialah Rp 50. 000, 00 per gantang bibit antah dalam satu kebun, seluruh minyak, oli mesin itu dijamin oleh pegawai bercocok tanam. Terdapat pula bentuk hitungan imbalan pegawai meniru kebun Rp 60. 000, 00 per gantang bibit antah dalam satu kebun, minyak serta oli mesin itu dijamin pegawai tani

serta terdapat pula bentuk penentuan imbalan pegawai bercocok tanam dalam membajak kebun atas metode borongan, Dimana pegawai bercocok tanam memutuskan imbalan membajak atas bersumber atas banyak hasil panen atas kebun itu. Contoh hasil panen kebun 600 gantang antah hingga pegawai bercocok tanam membajak kebun memutuskan harga imbalan meniru kebun Rp 300. 00, 00, dimana gasolin serta oli mesin dijamin oleh pegawai tanni. Semacam 5 gantang bibit

antah pegawai bercocok tanam dapat membajak kebun dalam kurung durasi 1 hari, serta terdapat pula lebih atas satu 1 hari buat membajak kebun disebabkan oleh kondisi kebun akan di meniru, sering- kali terdapat situasi kebun akan dibajak akan dalam(rawa), terdapat lahan

kebun akan keadaannya memiliki tanah liat jadi dikala membajak tanah hendak lengket ke mesin meniru, terdapat pula tanah kebun akan memiliki pasir jadi dikala membajak jadi sulit.

Atas era masa tabur profesi pegawai bercocok tanam merupakan menanam antah atas memakai sistem imbalan setiap hari buat pegawai pria serta imbalan per jam buat pegawai wanita. Pegawai pria bertugas mulai atas jam 07. 30– 16. 00 petang, atas memperoleh imbalan Rp 100. 000 serta pegawai wanita bertugas mulai atas jam 08. 00- 14. 00 siang, atas imbalan Rp 12. 000 per jam. Sistem imbalan imbalan pembersih gulma antah sam atas sistem penanaman antah hendak namun pria tidak terdapat bertugas mebersihkan gulma antah.

Atas masa panen, Pegawai bercocok tanam bertugas selaku pemanen hendak bertugas atas jam 08. 30 pagi hingga berakhir, bentuk hitungan imbalan pemanen kebun dalam wujud per gantang antah. Semisalnya dalam 100 gantang antah hendak dikeluarkan 20 gantang buat imbalan

pegawai bercocok tanam. Jadi jumlah imbalan pegawai bercocok tanam itu terkait hasil panen atas kebun akan di panen. Pria hendak memperoleh imbalan bonus dikala pengangkutan antah atas kebun mengarah tempat akan sudahdi pastikan oleh owner tanah, hitungan imbalan bawa antah ke tempat akan di menuju menentang dihitung per keranjang akan di membawa oleh pegawai pria, besaran imbalan terkait jarak akan ditempuh dikala bawa padi

Bersumber atas hasil observasi dini akan periset lakukan lewat tanya jawab atas salah satu pegawai bercocok tanam tanah kebun ialah berkata kalau berlaku seperti Pegawai bercocok tanam di Nagari Tach Baruah kerap menundaan pendapatan imbalan akan dicoba oleh owner tanah, owner tanah umumnya melunasi imbalan 4 bulan sehabis pekerjaan berakhir serta terdapat owner tanah melunasi imbalan hingga era panen antah akan memunculkan ketidak pastian serta kehilangan ekonomian buat pegawai(yanto, 2024).

Atas keterlambat imbalan akan diperoleh oleh pegawai bercocok tanam dapat pengaruhi dalam pelampiasan keinginan hidup ialah pangan, kediaman serta pakaian serta rendahnya imbalan pegawai bercocok tanam kerap kali tidak cocok atas eskalasi bayaran hidup, alhasil keselamatan pegawai bercocok tanam susah

terkabal. Situasi ini memunculkan kesenjangan ekonomi serta mengganggu derajat manusiawi pegawai bercocok tanam, akan sepatutnya dilindungi dalam perspektif ekonomi islam.

Bersumber atas kerangka balik atas di atas, hingga pengarang butuh buat melangsungkan riset lebih lanjut buat mangulas kasus kasus akan terjalin atas mengangkat judul ANALISIS SISTEM UPAH BURUH TANI NAGARI TAEH BARUAH MENERUT PERPEKTIF EKONOMI ISLAM

KAJIAN PUSTAKA

1. Upah

a. Penafsiran Upah

Buat Badan Studi Pengupahan Nasional, imbalan merupakan pembayaran akan dicoba oleh donatur kegiatan atas seorang akan sudah melaksanakan ataupun hendak melaksanakan profesi atas balasan pembayaran. Imbalan berperan selaku agunan buat proteksi kehidupan serta penciptaan orang serta diklaim ataupun ditaksir atas duit akan didetetapkan oleh akad, hukum, peraturan, serta denah bersumber atas akad kegiatan antara donatur kegiatan serta akseptor profesi(Yuni hidayatun, 2019)

Imbalan akan diartikan atas sebutan merupakan duit kas akan dipakai selaku ganti rugi ataupun balasan atas profesi akan sudah

didedikasikan buat menuntaskan tanggung jawab. Buat Hukum daya kegiatan Nomor. 13 Tahun 2000, Imbalan ialah“ hak pekerja atau pegawai akan diperoleh serta diklaim dalam wujud duit selaku balasan atas wiraswasta atau donatur kegiatan atas pekerja atau pegawai akan diresmikan serta dibayarkan buat sesuatu pernjanjian kegiatan, peluang ataupun peraturan perundang- undangan tercantum topangan an buat pekerja atau pegawai serta keluarganya atas sesuatu profesi serta ataupun upaya pelayanan akan sudah ataupun hendak dicoba”(Rizqa Amelia, 2023)

Dalam zona pertanian pedesaan akan berhubungan atas pertanian antah dipergunakan sistem pengupahan selaku selanjutnya:

1) Imbalan harian

Imbalan setiap hari umumnya dicoba buat profesi akan karakternya tidak senantiasa serta didasarkan atas lama durasi pekerja dalam bertugas. Hitungan imbalan pegawai setiap hari ini semacam dasar jam, hari. Dalam sistem imbalan buat durasi, pembayaran imbalan bisa dicoba atas gampang, tidak hanya itu kalkulasi imbalan ini pula tidak mengalutkan(Nuraini,, 2023)

2) Imbalan borongan

Imbalan borongan didasarkan atas dasar hasil kegiatan, alhasil terus menjadi besar

daya produksi hingga terus menjadi besar imbalan akan diperoleh oleh pegawai bercocok tanam. Dalam kondisi pertanian, spesialnya atas pegawai bercocok tanam, sistem borongan ini umumnya diaplikasikan buat profesi akan mempunyai dimensi hasil akan nyata, semacam pengurusan tanah, penanaman, membajak serta panen antah.

3) Imbalan bawon

Imbalan bawon ialah sistem pengupahan kegiatan atas pertanian antah akan dipraktikkan atas cara bebuyutan serta bersumber atas Kerutinan. Sistem ini legal buat orang tani atas eksekutor kebun ataupun pegawai panen antah. Orang tani eksekutor kebun hendak melaksanakan sesuatu upaya khusus dalam cara pertanian tumbuhan antah tanpa menemukan imbalan langsung, namun berkuasa memperoleh beberapa hasil atas panen sehabis diserahkan peluang buat turut dalam pemanenan antah. Imbalan Dalam Perpektif Ekonomi Islam

a. Penafsiran imbalan dalam ekonomi islam

Imbalan ataupun pendapatan ialah pembayaran akan diserahkan oleh tuan atas pekerja atas usahanya ikut serta dalam cara penciptaan. Imbalan dalam bahasa Arab diucap al- ujah. Atas bidang bahasa al- ajru akan berarti iwad(ubah), oleh karena itu al- sawab(balasan) dipanggil pula al- ajru

ataupun ataupun al- ujah(imbalan). Bayaran atas pelayanan akan diserahkan selaku balasan atas khasiat sesuatu profesi(Ruslam Abdul Ghofur, 2020)

Akan diartikan atas al- ujah merupakan pembayaran(imbalan kegiatan) akan diperoleh pekerja sepanjang beliau melaksanakan profesi. Islam membuat prinsip kalau penyerahan imbalan dicoba atas dikala selesainya sesuatu profesi. Dalam perihal ini, pekerja direkomendasikan buat memesatkan jasa atas tuan sedangkan buat pihak tuan sendiri dianjurkan memesatkan pembayaran imbalan pekerja(Silvi handayani, 2023)

b. Prinsip pengupahan dalam ekonomi islam

Dalam perpektif ekonomi islam, prinsip pengupahan dibuat 2 buatan ialah selaku selanjutnya:

1) Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesamarataan ialah tutur watak akan membuktikan aksi, perlakuan seimbang, tidak berat sisi, tidak membela, berpedoman atas bukti, seatasn. Sebaliknya tutur kesamarataan dalam bahasa arab berawal atas tutur" adala", akan dalam Al- Quran seringkali dituturkan dalam wujud perintah atau dalam wujud perkataan informasi(Ruslam Abdul Ghofur, 2020)

Seimbang dalam determinasi imbalan dalam ekonomi Islam arti seimbang dalam ketetapan imbalan bisa dimaksud, ialah:

a) Seimbang berarti Nyata serta Transparan

prinsip penting kesamarataan terdapat atas kejelasan akad(bisnis) serta komitmen melaksanakannya. Akad dalam perburuhan merupakan akad akan terjalin antara pekerja atas wiraswasta. membenarkan kalau seluruh determinasi terpaut imbalan di informasikan atas cara terbuka, rinci, serta bisa dimengerti oleh kedua pihak, bagus pekerja ataupun donatur kegiatan. Kejelasan melingkupi data mengenai jumlah imbalan, tata cara pembayaran, durasi penerapan, dan tanggung jawab akan wajib diastasi oleh tiap- tiap pihak, alhasil tidak terdapat ruang buat keragu- ragan ataupun ketidakpastian(gharar). Seimbang berarti proporsional

Seimbang berarti seatasn maksudnya, profesi seorang wajib dibalas buat berat profesi itu. Arti seimbang selaku sesuatu perihal akan seatasn, bisa diamati atas prinsip bawah akan dipakai Rasulullah SAW serta Khulafaur Rasyidin merupakan medio, berimbang dalam determinasi imbalan karyawan, tidak kelewatan atau sangat

sedikit(seatasn). Tujuan kuncinya supaya mereka sanggup penuhi seluruh keinginan utama mereka(Muhammad Syarul Hidayat, 2023)

2) kelayakan

Imbalan akan pantas ialah imbalan akan wajib cocok atas harga pasar daya kegiatan alhasil pekerja tidak tereksplorasi sepihak. Begitu juga akan ada dalam al- qur' an selaku selanjutnya:

مُفْسِدِينَ أَلْرَضِيفَتَعْنُو أَوْ لَا أَشْيَاءَ هُمَا لَلْأَسْتَبْخَسُو أَوْ لَا

Maksudnya” Serta janganlah kalian mudarat orang atas hak haknya serta jangan- lah kalian membuat kehancuran di alam”(QS. Asy Syua’ ra 183).

Buatan di atas berarti janganlah seorang mudarat orang lain, atas metode kurangi hak- hak akan sepatutnya didapat. Dalam penafsiran akan lebih jauh, hak- hak dalam imbalan berarti janganlah memperkerjakan imbalan seorang sampai jauh dibawah imbalan akan umumnya diserahkan. Bila imbalan akan diserahkan sangat kecil serta tidak lumayan buat penuhi keinginan bawah, ha ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial serta mengganggu penyeimbang ekonomi, akan berlawanan atas pantangan melakukan kehancuran dalam alam, imbalan akan pantas merupakan imbalan akan seimbang akan

tidak mudarat orang lain serta tidak dikurangi alhasil bisa memenuhi keinginan pekerja serta tidak memunculkan ketidakadilan sosial ataupun ekonomi(Ruslam Abdul Ghofur, 2020)

c. Kadar imbalan dalam islam

Penentuan kadar imbalan dalam ekonomi Islam antara lain selaku selanjutnya:

1) Penentuan Imbalan Minimal.

Tingkatan imbalan minimal ialah ketentuan akan wajib disetujui selaku bawah pemberlakuan buat para pekerja serta tuan. Ini dibutuhkan sebab pekerja dalam hubungannya atas tuan terletak dalam posisi akan amat lemas akan senantiasa terdapat mungkin kepentingannya tidak hendak aman serta terpelihara atas sebaik- baiknya. Mengenang letaknya akan lemas, Islam membuat atensi akan besar buat mencegah hak- hak nya atas pelanggaran akan dicoba oleh tuan.

2) Imbalan Tertinggi

Islam tidak membiarkan imbalan terletak dibawah tingkatan minimal akan diresmikan bersumber atas keinginan utama golongan pekerja, serta Islam pula tidak membiarkan terdapatnya eskalasi imbalan melampaui tingkatan khusus akan

didetapkan bersumber atas sumbangsinya keatas penciptaan.

3) Tingkatan Imbalan Sesungguhnya

Dalam penentuan imbalan ekonomi Islam menyediakan ruang buat berikan proteksi buat hak- hak para tuan serta pekerja. Tumbangnya imbalan di dasar tingkatan terendah tidak sepatutnya terjalin buat melindungi hak- hak pekerja, kebalikannya menaikan imbalan akan melampaui batasan paling tinggi tidak sepatutnya terjalin buat menyelamatkan kebutuhan tuan. Imbalan akan sebetulnya ialah perjanjian akan terjalin antara tuan serta pekerja akan naik serta turunnya hendak senantiasa terletak di antara kedua batas- batas ini bersumber atas hukum bekal serta permohonan ketenagakerjaan akan pastinya hendak dipengaruhi oleh standar hidup tiap hari atas golongan pekerja (Lukman Hakim, 2025)

2. Sistem Pemberian Upah

a. Tipe pekerjaan

Profesi merupakan aktivitas akan wajib dicoba orang buat penuhi keinginan hidup tiap hari akan wajib diastasi. Tipe profesi terdapat 2 berbagai awal profesi akan menciptakan benda serta profesi akan

menciptakan pelayanan. Profesi akan menciptakan benda diucap penciptaan ataupun profesi akan menciptakan benda buat penuhi keinginan hidup. Profesi akan menciptakan pelayanan merupakan profesi akan menciptakan pelayanan akan diperlukan warga ataupun menawarkan pelayanan semacam kesehatan, pembelajaran, serta lain-lain(Muhammad Ismail Yusanto serta Muhammad Karebet Widjayakusuma, tahun 2020)

b. Durasi pemberian upah

Imbalan akan islam merupakan imbalan akan cocok atas syariah islam ataupun imbalan akan bersumber atas etika- etika islam, semacam wujud profesi akan dicoba ketetapanannya wajib halal. Maksudnya orang akan bertugas tidak bisa menyambut profesi akan nyata dilarang dalam islam. Ketentuan imbalan dalam islam merupakan terdapatnya keikhlasan anantara kedua koyak pihak akan berakat, khasiat akan menejadi akad wajib mengenali secraa totalitas sampai tidak terjalin permasalahan di setelah itu hari, subjek akad itu suatu akan halal ataupun tidak diharamkan serta imbalan wajib nyata semacam durasi pembayaran serta besaran upah

c. Penerapan pekerjaan

Dalam penerapan profesi antara

wiraswasta serta pekerjadilarang melakukan silih mudarat. Seseorang pekerja wajib menuntaskan profesinya sehabis wiraswasta membuatkan imbalan keatasnya. Kebalikannya wiraswasta wajib membuatkan imbalan bila pekerja sudah menuntaskan profesinya.

d. Standar upah

Standar imbalan ialah sesuatu perihal akan dipakai oleh para wiraswasta untuk membuatkan imbalan atas pekerja di area upaya ataupun area kerjanya. Standar imbalan wajib cocok atas prinsip kesamarataan serta kelayakan dalam membuatkan imbalan atas pekerja, wiraswasta direkomendasikan buat membuatkan imbalan pekerja akan sebaiknya beliau dapat cocok atas akad. Dalam akad(mengenai imbalan) kedua koyak pihak diperingatkan buat berlagak jujur serta seimbang, alhasil tidak terjadi aksi menyiksa keatas orang lain dan tidak mudarat kebutuhan sendiri.

1. Rancangan Imbalan Akan Seimbang Dalam Ekonomi Islam

Rancangan imbalan akan seimbang dalam ekonomi islam akan dikemukakan oleh ibnu taimiyah. Dalam perspektif Islam, mengenai ketenaga kerjaan ini pula diulas salah satunya oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menarangkan, imbalan akan

sebanding hendak ditetapkan oleh imbalan akan sudah dikenal atas cara nyata(musamma) dalam permasalahan jual ataupun carter, harga akan sudah dikenal(tsaman musamma) hendak diperlakukan selaku harga akan sebanding.

Pemikiran Imbalan akan Seimbang dalam perspektif ekonomi islam Islam selaku selanjutnya:

a. Imbalan Wajib Cocok atas Angka Pekerjaan

Pembayaran imbalan akan diserahkan wajib proporsional atas bobot kegiatan, kemampuan, dan durasi akan dicurahkan oleh seseorang pekerja. Tidak bisa terdapat kesenjangan akan memunculkan ketidakadilan antara profesi serta kompensasinya.

b. Berartinya Kejelasan Akad serta Kesepakatan

Imbalan wajib diresmikan bersumber atas perjanjian akan nyata antara pekerja serta donatur kegiatan. Seluruh wujud perjanjian akan memiliki faktor gharar(ketidak jelasan) ataupun pemanfaatan merupakan berlawanan atas prinsip Islam.

c. Pantangan Janji Pembayaran Upah

Selanjutnya ini cocok atas

perkataan nabi Rasul SAW“ Berikanlah imbalan pekerja saat sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu Majah) Ini membuktikan kalau imbalan wajib dibayar pas durasi.

d. Imbalan selaku Wujud Keselamatan Sosial

Imbalan tidak cuma jadi ganti rugi kegiatan, namun pula berperan selaku alat buat melindungi keselamatan hidup pekerja serta keluarganya. Oleh sebab itu, imbalan wajib lumayan buat penuhi keinginan bawah mereka.

e. Tidak Memiliki Faktor Kezaliman

Sistem pengupahan dalam Islam wajib leluasa atas aplikasi riba, akal busuk, serta aksi aniaya akan mudarat salah satu pihak begitu juga dipaparkan dalam pesan angkatan laut(AL) baqarah 279:

لَا أَمْوَالُكُمْ رُءُوسُكُمْ تُبْنُونَ إِنَّ
وَرَسُولِهِ أَلَّهُمْ يَخْرِقُ أَفْئِدَتُهُمْ فَأَتَقَعُوا الْمَقَانِ
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ

Maksudnya:“ bila kalian tidak melakukannya(meninggalkan riba), hingga ketahuilah kalau allah serta rasl- nya hendak memerangimu. Serta bila kalian bertaaubat, hingga buatmu utama

hartamu, kalian tidak melakukan aniaya serta tidak di zalimi”.

Rancangan tidak zolim(tidak menyiksa) dalam pemberian imbalan dalam ekonomi Islam menekankan prinsip kesamarataan serta hak akan wajib diastasi antara pekerja serta wiraswasta tanpa terdapat pihak akan dibebani. Dalam Islam, imbalan wajib diserahkan atas cara jujur, seimbang, serta seatasn cocok atas profesi serta keinginan hidup pekerja, dan disetujui atas cara tembus pandang saat sebelum pekerja mulai bertugas.

2. Prinsip- prinsip dalam ekonomi islam

Prinsip- prinsip akan ada atas ekonomi islam ialah:

1) Prinsip Tauhid

Pangkal penting etik Islam merupakan keyakinan penuh serta asli keatas ahadiat Tuhan serta ini atas cara spesial membuktikan format lurus Islam, ikatan ini dipengaruhi penyerahan orang tanpa ketentuan di hadapan tuhan. Dalam Islam, seluruh suatu akan terdapat tidak dilahirkan atas percuma. Tujuan diciptakannya orang merupakan buat beribadah keatasnya. Sebab itu seluruh kegiatan orang dalam hubungannya atas alam serta pangkal energi dan orang(mu’ amalah)

dibingkai atas kerangka ikatan atas Allah. Sebab keatas- Nya orang aka mempertanggungjawabkan seluruh aksi, tercantum kegiatan ekonomi serta bidang usaha(Saprida M. H. I, 2021)

2) Prinsip Adil

Allah merupakan inventor seluruh suatu, serta salah satu sifat- Nya adalah adil. Ia tidak diskriminatif perlakuan keatas makhluk- Nya secara adzalim. Orang selaku khalifah di wajah alam wajib menjaga hukum Allah di alam serta menjamin kalau konsumsi seluruh pangkal energi ditunjukan buat keselamatan orang, biar seluruh menemukan khasiat atas atasnya secara adil serta bagus. Dalam banyak buatan, Allah menginstruksikan orang buat melakukan seimbang. Islam mendeskripsikan seimbang selaku tidak menzalimi serta tidak dizalimi. Keterkaitan ekonomi atas angka ini merupakan kalau pelakon ekonomi tidak dibolehkan buat mengejar profit individu apabila perihal itu mudarat orang lain ataupun mengganggu alam. Tanpa kesamarataan, orang hendak terkotak- kotak dalam bermacam kalangan. Kalangan akan satu hendak menzalimi kalangan akan lain, alhasil terjalin pemanfaatan orang atas orang.

Tiap- tiap berusaha memperoleh hasil akan lebih besar atas upaya akan dikeluarkannya sebab kerakusannya.

3) Prinsip Nubwwah

Watak kandungan serta kebijaksanaan Allah, orang tidak dibiarkan sedemikian itu saja di bumi tanpa menemukan edukasi. Sebab itu diutuslah para Rasul serta Rasul buat mengantarkan petunjuk atas Allah atas orang mengenai gimana hidup akan bagus serta betul di bumi, serta mengarahkan jalur buat balik(taubat) keasal- muasal seluruh suatu ialah Allah. Guna Rasul merupakan buat jadi bentuk terbaik akan wajib diteladani orang supaya menemukan keamanan di bumi serta alam baka. Buat pemeluk Mukmin, Allah sudah mengirimkan orang bentuk akan terakhir serta sempurna buat diteladani hingga akhir era, Rasul Muhammad Saw. Sifat- sifat penting si model akan wajib diteladani oleh orang atas biasanya serta pelakon ekonomi dan bidang usaha atas khususnya merupakan Sidiq(betul, jujur), tepercaya(tanggung jawab, bisa diyakini, integritas), fathonah(kecerdasan, kebijaksanaan, intelektualitas) serta tabligh(komunikasi kelangsungan serta

penjualan).

4) Prinsip Khalifa

Dalam Al- Qur' an Allah berkata kalau orang dilahirkan buat jadi khalifah di bumi maksudnya buat jadi atasan serta pemakmur alam. Sebab itu atas dasarnya tiap orang merupakan atasan. Dalam Islam penguasa memainkan andil akan kecil namun amat berarti dalam perekonomian. Kedudukan kuncinya merupakan buat menjamin perekonomian supaya berjalan cocok atas syari' ah, serta buat membenarkan tidak terjalin pelanggaran keatas hak- hak orang. Seluruh ini dalam kerangka menggapai tujuan- tujuan syari' ah buat memajukan keselamatan orang. Perihal ini digapai atas mencegah keagamaan, jiwa, ide, martabat, serta kekayaan orang.

5) Prinsip Pantangan riba

Pantangan riba(bunga) merupakan salah satu prinsip elementer dalam ekonomi Islam. Riba dikira selaku pemanfaatan akan mudarat serta berlawanan atas prinsip kesamarataan. Dalam ekonomi Islam, aplikasi riba dilarang keras, serta tiap bisnis finansial wajib dicoba tanpa faktor bunga ataupun riba. Perihal ini bermaksud

buat mendesak bisnis akan seimbang serta silih profitabel antara pihak- pihak akan ikut serta, dan melindungi kemantapan ekonomi dalam waktu panjang.

METODE PENELITIAN

Tipe riset akan dipakai merupakan riset alun- alun(Field Research) ialah riset akan dicoba atas mengangkut informasi akan terdapat di alun- alun atas peristiwa akan sesungguhnya. Atas dasarnya riset alun- alun ialah riset akan dilaksanakan atas cara langsung atas posisi riset.

Riset ini memakai tata cara pendekatan kualitatif bertabiat deskriptif, ialah tata cara akan mempelajari sesuatu golongan orang, sesuatu subjek, pandangan insiden atas era saat ini.

Determinasi posisi riset ini merupakan di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 5 Pulu Kota, atas durasi riset kala kembali desa, atas alibi posisi riset di desa laman serta telah lama mengikuti dan memandang langsung kasus akan terjalin atas analisa bentuk imbalan pegawai bercocok tanam dalam perpektif ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Upah Buruh Tani Nagara Taeh Baruah

1. Wujud sistem imbalan akan diberlakukan

a. Akad kegiatan owner tanah atas pegawai tani

Dalam aplikasi ikatan kegiatan antara pegawai bercocok tanam atas owner tanah di area Nagari Taeh Baruah terdapatnya akad kegiatan akan jadi pandangan berarti selaku pondasi berlangsungnya cara penciptaan pertanian. Walaupun tidak bertabiat resmi ataupun tercatat, pola komunikasi serta perjanjian kegiatan akan sudah dipakai atas dahulu hingga saat ini.

Lewat hasil tanya jawab akan dicoba pengarang atas warga selaku pegawai bercocok tanam serta owner tanah serta informan mengantarkan kalau:

“ akad dicoba atas cara perkataan, umumnya owner tanah ataupun pegawai bercocok tanam menghadiri langsung ataupun ditelfon buat melaksanakan profesi, esok hendak digarap apa saja akan akan hendak digarap, upahnya, bila pelaksanaan determinasi imbalan”(nelpida 2025)

Akad kegiatan akan kerap terjalin di Nagari Taeh Baruah antara owner

tanah atas pegawai bercocok tanam biasanya dicoba atas cara perkataan. Metode komunikasi akan dipakai bertabiat informal, bagus lewat pertemuan langsung ataupun lewat melalui telepon. Dalam melaksanakan akad salah satu pihak bagus owner tanah ataupun pegawai hendak bertamu lewat melalui telefon ataupun berjumpa langsung buat mengantarkan keinginan daya kegiatan dalam aktivitas pertanian. Dalam komunikasi itu, disetujui sebuatan perihal berarti, antara lain tipe profesi akan hendak dicoba, besaran serta wujud imbalan, durasi penerapan profesi, dan standar kegiatan akan legal. Walaupun perjanjian dituangkan tidak dalam wujud tercatat, bagus owner tanah ataupun pegawai bersama menguasai serta meluluskan determinasi itu bersumber atas aplikasi akan sudah tercipta atas cara sosial serta kultural d warga taeh Baruah.

Bentuk akad perkataan ditaksir lumayan efisien sebab dilandasi atas rasa silih yakin serta Kerutinan akan sudah berjalan lama di golongan warga pegawai bercocok tanam. Tetapi kelemahan atas akad karakternya akan tidak resmi pula mencadangkan kemampuan terbentuknya ketidak seahaman bila tidak diiringi atas

komunikasi akan nyata serta terbuka.

b. Sistem imbalan dalam kegiatan pertanian

Dalam aktivitas pertanian, sistem pemberian imbalan atas pegawai bercocok tanam jadi salah satu pandangan berarti akan mempengaruhi kelancaran cara penciptaan. Penentuan sistem imbalan dicocokkan atas tipe profesi, keseriusan daya kegiatan, dan perjanjian antara owner tanah serta pegawai.

Bersumber atas hasil tanya jawab akan dicoba pengarang atas warga selaku pegawai bercocok tanam, owner tanah serta informan membuatkan penjelasan:

“profesi akan kita jalani atas masa pra tabur merupakan membajak kebun atas memakai sistem borongan, profesi memacul memakai sistem imbalan per jam, atas durasi masa tabur menanam antah memakai sistem per jam serta profesi mensterilkan gulma pula menggunakan sistem imbalan per jam, atas masa panen memakai sistem imbalan borongan”(ayah et 2025)

Dikenal kalau sistem imbalan pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah dibedakan jadi 2 wujud penting, ialah sistem imbalan bersumber atas durasi(per jam) serta sistem imbalan borongan. Penentuan sistem ini dicocokkan atas karakter profesi akan dicoba. Buat tipe profesi semacam menanam antah, memacul serta mensterilkan gulma, imbalan diserahkan bersumber atas hitungan per jam. Perihal ini dicoba sebab profesi itu bertabiat enteng tetapi membutuhkan intensitas serta akurasi, dan dilaksanakan dalam durasi kegiatan akan fleksibel. Sedangkan itu, buat profesi akan lebih berat ataupun mengaitkan daya kegiatan dalam jumlah besar, semacam membajak kebun serta menuai antah, dipakai sistem imbalan borongan. Dalam sistem borongan, pegawai dibayar bersumber atas hasil ataupun daya muat profesi, bukan durasi akan dihabiskan. Sistem borongan ditaksir lebih berdaya guna dalam menanggulangi profesi akan cakupannya besar serta hasilnya dapat dihitung atas cara tentu.

Atas begitu, sistem imbalan akan diaplikasikan memantulkan adaptasi keatas karakter tiap- tiap tipe profesi, sekalian jadi wujud perjanjian akan

menata ikatan kegiatan antara pegawai serta owner tanah atas cara efisien serta berdaya guna.

c. Metode penentuan serta besaran upah

Determinasi besaran imbalan pegawai bercocok tanam ialah pandangan berarti dalam ikatan kegiatan di zona pertanian. Besaran imbalan umumnya dicocokkan atas tipe profesi, tingkatan kesusahan, dan kedudukan serta partisipasi pegawai dalam cara penciptaan. Bersumber atas tanya jawab akan dicoba pengarang atas pegawai bercocok tanam serta owner tanah serta informan membuat data hal rincian besaran imbalan akan legal di Nagari Taeh Baruah:

“ Buat profesi membajak kebun, imbalan akan diserahkan merupakan sebesar 60. 000 rupiah per satu gantang hasil panen. Sebaliknya buat profesi mecangkul, menanam antah serta mensterilkan gulma, sistem imbalan akan diaplikasikan merupakan setiap hari buat pria serta per jam buat wanita atas perbandingan bersumber atas tipe kemaluan pegawai pria menyambut imbalan sebesar Rp 100. 000 rupiah per hari,

sedangkan pegawai wanita memperoleh imbalan dekat Rp 14.000 rupiah per jam. Buat profesi menuai antah, imbalan pegawai dihitung bersumber atas hasil panen, di mana atas tiap 100 gantang antah akan dipanen, 20 gantang diserahkan selaku imbalan buat pegawai”(ibuk yeni 2025).

Bersumber atas hasil data atas informan bisa disimpulkan mengenai metode besaran imbalan akan diaplikasikan imbalan di Nagari Taeh memantulkan adaptasi keatas karakter serta partisipasi tiap- tiap tipe profesi, dan mencermati perbandingan kedudukan antara pegawai pria serta wanita dalam aktivitas pertanian. Sistem imbalan di Nagari Taeh Baruah pula membuktikan terdapatnya campuran antara imbalan setiap hari serta sistem buat hasil akan diaplikasikan atas cara fleksibel cocok keinginan alun- alun.

d. Angka kerja

Dalam pemikiran Islam, profesi bukan semata- mata kegiatan raga buat mendapatkan pemasukan, namun pula memiliki format akhlak serta kebatinan.

Angka sesuatu profesi didetetapkan tidak cuma oleh hasil akhir akan digapai, namun pula oleh hasrat, metode penerapannya, dan sepanjang mana profesi itu dijalani atas pemahaman atas Allah SWT.

Bersumber atas hasil tanya jawab akan dicoba oleh pengarang atas masyarat akan bertugas selaku pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah serta informan membuatkan keterangan

“umumnya aku bertugas atas pagi hingga petang, tentu terdapat istirahatnya, serta aku rehat buat makan siang serta melakukan shalat, serta aku senantiasa bawa busana akan bersih buat di gunakan dikala shalat”(ayah et 2025)

Lewat hasil tanya jawab itu membuktikan kalau informan memandang profesi selaku buatan atas ibadah. Atas melindungi durasi shalat serta menyiapkan diri atas cara spesial, pegawai tidak cuma bertugas buat hasil duniawi semata, namun pula berupaya melindungi nilai- nilai kebatinan dalam tiap aktivitasnya. angka profesi sebuah pegawai bercocok tanam tidak cuma diamati atas bidang daya produksi akan diperoleh, namun pula atas gimana pegawai melindungi integritas serta ikatan atas Tuhan sepanjang cara

kegiatan berjalan tindakan akan diarahkan pegawai bercocok tanam senantiasa jadi cerang balasan sepanjang dicoba atas hasrat akan ikhlas, dijalani atas melindungi etika, dan diiringi atas penerapan peranan agama, mempunyai peran akan agung dalam anutan islam.

Tidak hanya itu ada orang tani akan sedang meneruskan profesinya sebaliknya durasi shalat telah masuk, bersumber atas tanya jawab akan dicoba pengarang atas pegawai bercocok tanam akan membuatkan penjelasan:

“ bila profesi aku berakhir saat sebelum shalat tengah hari tiba, aku melakukan shalat di rumah, bila profesi hingga petang, aku kerap kurang ingat melakukan shalat Diakibatkan badan dalam kondisi kotor, tidak bawa busana akan bersih serta aku meneruskan profesi disebabkan profesi belum berakhir”(ayah ujang 2025).

Statment akan di informasikan informan melukiskan terdapatnya bimbang antara desakan profesi dankewajiban ibadah. Di satu buatan, informan membuktikan tanggung jawab keatas profesinya akan belum berakhir,

akan memantulkan angka ketertiban serta etos kegiatan. Tetapi di buatan lain, ada kelengahan dalam menunaikan peranan kebatinan akan jadi tiang penting dalam angka kegiatan buat Islam. Suasana ini menampilkan kalau walaupun profesi mempunyai angka ibadah, angka itu dapat menurun bila tidak diajari atas penerapan peranan atas Allah SWT. Islam menaruh profesi selaku buatan atas dedikasi, tetapi senantiasa menerangkan kalau ikatan orang atas Allah tidak bisa terbengkalai dalam prosesnya.

Atas begitu, hasil tanya jawab ini membuktikan kalau angka sesuatu profesi tidak cuma diukur atas tanggung jawab keatas kewajiban duniawi, namun pula atas sepanjang mana seorang sanggup melindungi penyeimbang antara daya produksi kegiatan serta penerapan ibadah. Tantangan- tantangan ini jadi baakanan jelas kalau aplikasi nilai- nilai Islam dalam profesi menginginkan pemahaman, perencanaan, serta ketertiban kebatinan akan kokoh.

e. Kejelasan akad

Dalam etika bidang usaha Islam, kejelasan akad(akad) serta kejernihan ialah 2 prinsip elementer akan wajib

ditegakkan dalam tiap wujud bisnis, tercantum dalam ikatan kegiatan antara pegawai bercocok tanam serta owner tanah. Kejelasan akad berperan buat membenarkan kalau kedua koyak pihak menguasai hak serta peranan tiap- tiap saat sebelum profesi diawali. Sedangkan itu, kejernihan jadi alas buat menghasilkan keyakinan serta menjauhi kemampuan bentrokan ataupun kesalahpahaman sepanjang cara kegiatan berjalan.

Hasil tanya jawab akan dicoba oleh pengarang atas salah satu informan akan menarangkan kalau:

“ Saat sebelum profesi diawali telah terdapat kesepkatan dini antara pegawai bercocok tanam atas owner tanah, si owner tanah hendak menarangkan mengenai tipe profesi akan hendak dicoba oleh pegawai serta besaran imbalan, lewat melalui telefon ataupun berjumpa langsung atas pegawai”(ibuk nimar)

Mengenai kejelasan akad saat sebelum profesi diawali antara pegawai bercocok tanam atas owner tanah sudah dijalani atas bagus di nagari taeh baruah. Informan mengantarkan kalau saat sebelum mengawali profesi, owner

tanah sudah menarangkan atas cara terbuka hal wujud kegiatan serupa akan hendak dicoba. Uraian itu mencakup tipe profesi akan wajib dituntaskan dan besaran imbalan akan hendak diperoleh. Perihal ini membuktikan kalau komunikasi antara kedua koyak pihak berjalan atas terbuka serta silih menguasai, alhasil terwujud ikatan kegiatan akan dilandasi dasar kesamarataan serta keikhlasan, begitu juga akan diajarkan dalam prinsip-prinsip muamalah Islam.

f. Keinginan pekerja

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberian imbalan atas pekerja tidak cuma diamati selaku wujud ganti rugi atas pelayanan akan diserahkan, namun pula wajib memikirkan pandangan kifayah, ialah keahlian imbalan itu dalam penuhi keinginan bawah hidup pekerja serta keluarganya atas cara pantas. Pandangan kifayah menekankan kalau imbalan akan diserahkan wajib lumayan buat menjamin kesinambungan hidup atas cara kemanusiaan, tercantum keinginan pangan, pakaian, kediaman, pembelajaran, serta kesehatan. Rancangan ini menaruh angka manusiawi serta keselamatan selaku

buatan integral atas kesamarataan ekonomi. Atas begitu, Islam tidak cuma menuntut kejelasan serta perjanjian dalam sistem pengupahan, namun pula menekankan kalau imbalan wajib mempunyai energi bawa keatas keberlangsungan hidup akan bergengsi buat tiap pekerja.

Bersumber atas hasil tanya jawab akan dicoba pengarang atas salah satu informan akan bertugas selaku pegawai bercocok tanam di nagari taeh baruah melaporkan:

“profesi selaku pegawai bercocok tanam sedang belum tercukupi dalam penuhi keinginan hidup disebabkan hitungan jumlah imbalan tidak terdapat naik atas tahun ketahun sebaliknya harga utama pelampiasan keinginan hidup terus menjadi naik, terdesak kita wajib mencari profesi lain buat penuhi keinginan hidup”(ibuk upik).

Imbalan akan diperoleh pegawai bercocok tanam atas owner tanah tidak terdapat naik sebaliknya keinginan hidup terus menjadi banyak serta harga benda lalu naik. Oleh sebab itu, buat menutupi kekurangan itu, pegawai bercocok tanam merasa butuh mencari

profesi bonus di luar kegiatan bertani. Perihal ini membuktikan kalau walaupun profesi selaku pegawai bercocok tanam senantiasa dicoba, namun atas buatan pemasukan, pekerjaan ini belum sanggup membuatkan agunan ekonomi akan normal buat para pegawai bercocok tanam. Pekerja selaku pegawai bercocok tanam serta informan mengantarkan kalau pandangan kifayah ataupun berkecukupan imbalan akan diserahkan atas pekerja kurang menuhi keinginan tiap hari buat warga, akan bertugas selaku pegawai bercocok tanam saja.

Perihal ini berlawanan atas pandangan ekonomi islam, dimana imbalan idealnya wajib lumayan buat penuhi keinginan utama pekerja serta keluarganya atas cara pantas, tercantum pangan, pakaian, serta kediaman, perihal ini searah atas rancangan dharuriyyat(keinginan pokok) dalam makasit syariah Tidak hanya itu terdapat pula ada orang tani akan merasakan bila senantiasa mendapatkkn profesi senantiasa hingga hendak tercukupi keinginan hidup tiap hari, lewat tanya jawab akan dicoba pengarang atas salah satu pegawai bercocok tanam berkata:

“ bila kita memperoleh profesi tiap hari hingga tercukupi keinginan hidup tiap hari saja buatkebutuhan akan lebih besar tidak tercukupi kita wajib mencari profesi sambilan”(ayah yasit 2025)

Kesimpulan atas hasil tanya jawab itu yakni kalau kala pegawai bercocok tanam memperoleh profesi tiap hari, keinginan utama semacam makan serta keinginan rumah tangga setiap hari sedang bisa diatasi. Tetapi begitu, buat penuhi keinginan lain akan lebih besar serta bertabiat waktu jauh, semacam bayaran pembelajaran, kesehatan, koreksi rumah, ataupun keinginan gawat akan lain, pemasukan atas profesi penting itu dirasa belum mencukupi. Oleh sebab itu, pegawai bercocok tanam kerap kali wajib mencari profesi bonus di luar kegiatan penting mereka buat menutupi kekurangan pemasukan. Situasi ini memantulkan kalau ketersediaan kegiatan akan berkepanjangan serta pemasukan akan pantas jadi keinginan pokok buat pegawai buat menggapai derajat hidup akan lebih normal serta aman gram.

Pantangan janji pembayaran upah Dalam Islam, pembayaran imbalan pas

durasi ialah peranan akhlak serta syariat akan tidak bisa diabaikan. Rasulullah berfirman:" Berikanlah imbalan pekerja saat sebelum kering keringatnya"(HR. Ibnu Majah). Perkataan nabi ini menerangkan kalau menunda pembayaran imbalan ialah wujud aniaya akan dilarang, sebab bisa mudarat pekerja akan menggantungkan hidupnya atas balasan atas hasil kegiatan itu.

Lewat tanya jawab atas salah satu pegawai bercocok tanam, pengarang memperoleh data atas informan akan menarangkan ialah:

“ terbentuknya keterlambatan dalam pembayaran imbalan akan dicoba oleh owner tanah atas pegawai, janji pembayaran seringkali 1 bulan ataupun hingga era panen datang, terkini dibayar sementara itu profesi telah kita selesaikan”(ayah epi 2025)

Atas terbentuknya janji pembayaran imbalan akan dicoba oleh owner tanah ke pegawai bercocok tanam Situasi ini berpotensi memunculkan ketidakadilan sosial serta ketidaknyamanan buat pegawai bercocok tanam. Keterlambatan pembayaran imbalan melemahkan

keyakinan serta mengusik kesinambungan hidup para pekerja akan tergantung atas pemasukan setiap hari ataupun mingguan. Dalam kondisi etika bidang usaha Islam, perihal ini membuktikan sedang terdapatnya tantangan dalam aplikasi nilai-nilai kesamarataan serta tanggung jawab dalam ikatan kegiatan antara owner tanah serta pegawai bercocok tanam.

Terdapat pula owner tanah akan melunasi imbalan pegawai bercocok tanam sehabis profesi telah berakhir, lewat tanya jawab akan dicoba atas salah satu pegawai bercocok tanam di nagari taeh baruah serta informan memberikan data mengenai:

“ buat pembayaran imbalan telah dilaksanakan atas perjanjian dini, dimana owner tanah melunasi imbalan dicoba sehabis profesi telah digarap”(ibuk yenti 2025)

Imbalan akan dibayar sehabis profesi berakhir membuktikan terdapatnya wujud kejelasan dalam cara bisnis, walaupun perjanjian itu tidak tercatat atas cara resmi. Yusuf Qardhawi menerangkan kalau salah satu wujud aniaya dalam ikatan kegiatan merupakan menunda pembayaran imbalan atas cara tidak legal, sebab

perihal itu hendak memunculkan beban buat pekerja akan menggantungkan hidupnya atas imbalan setiap hari. Qardhawi meningkatkan kalau imbalan bukan cuma wujud ganti rugi, namun pula buatan atas tanggung jawab akhlak serta sosial tuan keatas keselamatan pekerja. Oleh sebab itu, walaupun sudah terjalin perjanjian, aplikasi pembayaran akan dicoba sehabis profesi berakhir wajib diiringi atas kejelasan durasi serta tanggung jawab akhlak atas pihak donatur kegiatan. Perihal ini berarti supaya tidak terjalin janji akan mudarat pegawai, dan buat membenarkan kalau sistem kegiatan berjalan cocok prinsip kesamarataan dalam ekonomi Islam.

g. Tidak memiliki ke zhaliman

Salah satu prinsip penting dalam sistem pengupahan buat perspektif ekonomi islam merupakan kalau imbalan akan diserahkan atas pekerja tidak bisa memiliki faktor ke zhaliman. Islam memandang ke zaliman selaku aksi akan amat tecela serta bertentangan atas angka kesamarataan akan jadi bawah ikatan sosial serta ekonomi. Oleh sebab itu pemberian imbalan wajib dicoba atas cara seimbang, jujur, terpercaya cocok atas akan disetujui,

supaya tidak memunculkan kehilangan ataupun ketidak nyamanan buat pihak bertugas.

Bersumber atas hasil tanya jawab akan dicoba pengarang atas salah satu informan melaporkan:

“ betul, dalam melakukan profesi aku telah mempraktikkan prinsip jujur serta tepercaya dalam bertugas cocok perjanjian atas owner tanah”(ayah luk’ in 2025)

Tindakan jujur serta tepercaya akan ditunjukkan oleh informan memantulkan penerapan nilai- nilai etika Islam dalam bertugas, spesialnya dalam menjauhi aksi aniaya, bagus keatas owner tanah ataupun keatas dirinya sendiri. Atas melaksanakan profesi atas cara jujur, berarti pekerja tidak mengutip hak akan bukan kepunyaannya, tidak kurangi mutu profesi, dan tidak menyalahgunakan keyakinan akan diserahkan. Prinsip tiidak aniaya searah atas anutan Islam akan menekankan berartinya kesamarataan(merupakan) serta pantangan melakukan aniaya dalam seluruh wujud muamalah, tercantum dalam kedekatan kegiatan antara pegawai serta owner tanah.

Tidak hanya itu pula ada orang

tani akan tidak jujur serta tepercaya aksi pengumpulan hasil penen tanpa permisi, ketidak jujurann, tepercaya dalam bertugas ketidak jelasan data berarti terpaut pengupahan. Bersumber atas hasil tanya jawab atas salah satu informan akan melaporkan:

“ umumnya kerap terjalin tidak jujur dalam durasi jam bertugas, contoh rehat lama durasi kegiatan terbangun tetapi pendapatan imbalan sedang full, serta ketidak amanahan bertugas semacam bertugas cuma beberapa akan digarap atas seluruh profesi namun hitungan imbalan senantiasa ful”(ayah yanto 2025)

Atas ketidak jujurann serta tepercaya dalam bertugas menarangkan kalau kerap terjalin suasana di mana pegawai memanjangkan durasi rehat atas cara tidak alami, alhasil banyak durasi kegiatan akan terbangun. Tidak hanya itu, ada pula sikap tidak tepercaya dalam penerapan kewajiban, di mana profesi tidak dicoba atas cara global serta hasilnya tidak cocok atas impian, sebab cuma beberapa atas keseluruhan profesi akan betul- betul dituntaskan atas bagus. Kejadian ini memantulkan lemahnya komitmen

keatas perjanjian kegiatan akan sudah terbuat antara pegawai serta owner tanah. Dalam kondisi etika bidang usaha Islam, tindakan tidak jujur serta tidak tepercaya ini amat berlawanan atas prinsip bawah muamalah akan menuntut integritas dalam bertugas. Aksi sejenis ini bisa menimbulkan kesenjangan dalam pemberian imbalan, di mana pegawai senantiasa menyambut balasan cocok akad, sementara itu partisipasi kegiatan akan diserahkan tidak memantulkan angka imbalan itu atas cara seimbang.

Islam menekankan berartinya menunaikan tepercaya serta melindungi kejujuran dalam tiap wujud bisnis serta kegiatan serupa. Allah Swt. Berkata QS. An- Nisa: 58:

أَنَّا لَنَسْبِتَنَّ حَكْمَتَكُمْ إِذَا أَهْلَيْهَا لَنَالَمْ نَتَّبِعُوا أَنِّي أَمْرُ
كُمَا لَلَّهَانَ بَصِيرًا سَمِعًا كَانَا لَلَّهَانَ
بِعِظَتُكُمْ نِعَمًا لَلَّهَانَ ۖ
بِالْعَدْلِ لَنَحْكُمُوا ۖ

Maksudnya:“ Sebetulnya Allah memerintahkan kalian mengantarkan tepercaya atas pemiliknya. Bila kalian memutuskan hukum di antara orang, harusnya kalian tetapkan atas cara seimbang. Sebetulnya

Allah berikan pengajaran akan sangat bagus keatasmu. Sebetulnya Allah Maha Mengikuti lagi Maha Memandang”.

Bila pegawai tidak melakukan profesi begitu juga mestinya, tetapi senantiasa menuntut imbalan cocok perjanjian, hingga perihal itu bisa terkategori selaku wujud aniaya keatas owner tanah. Dalam waktu jauh, sikap sejenis ini tidak cuma mudarat pihak donatur kegiatan, namun pula bisa mengganggu keyakinan serta ikatan kegiatan akan sepatutnya dibentuk atas bawah kesamarataan serta tanggung jawab.

Atas begitu, berarti buat kedua koyak pihak bagus pegawai ataupun owner tanah buat melindungi integritas dalam penerapan perjanjian, buat menciptakan sistem kegiatan akan seimbang, tembus pandang, serta cocok atas prinsip- prinsip Islam.

B. Analisis konsep upah akan adil dalam ekonomi islam di Nagri Taeh Baruah

1. Prinsip Tauhid

Aplikasi prinsip tauhid dalam ekonomi Islam di Nagari Taeh Baruah

beberapa pegawai bercocok tanam telah mempraktikkan dalam kehidupan tiap hari, fakta pegawai bercocok tanam mempraktikkan prinsip tauhid kala pegawai bercocok tanam dikala bertugas serta durasi shalat tiba, pegawai bercocok tanam langsung menyudahi bertugas serta mensterilkan diri buat bersiap melaksanakan shalat. Hendak namun beberapa pegawai bercocok tanam sedang lemahnya pemahaman kebatinan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, khususnya dalam ikatan kegiatan antara owner tanah serta pegawai bercocok tanam. Beberapa pegawai membuktikan antusias kegiatan akan besar, tetapi dalam praktiknya, sedang ada sikap akan memantulkan kelengahan keatas nilai- nilai tauhid, semacam melalaikan peranan shalat kala bertugas, ataupun meneruskan profesi walaupun telah masuk durasi ibadah, atas alibi situasi badan akan kotor ataupun profesi akan belum berakhir. Di buatan lain, beberapa owner tanah pula tidak seluruhnya menancapkan angka ketauhidan dalam menganggap pegawai, misalnya atas tidak berikan imbalan akan pantas, ataupun tidak memenuhi perjanjian kegiatan atas cara jujur serta

bertanggung jawab.

Dalam filosofi ekonomi Islam, prinsip tauhid memiliki arti kalau semua kegiatan ekonomi ialah buatan atas ibadah atas Allah, serta wajib dicoba atas penuh pemahaman hendak ahadiat serta pengawasan- Nya. Tauhid menuntut terdapatnya kejujuran, tepercaya, tanggung jawab, serta kesamarataan dalam tiap bisnis ekonomi. Kala para pelakon ekonomi tidak menghasilkan Allah selaku pusat arah dalam bertugas, hingga hendak timbul praktik- praktik akan membidik atas kedzaliman, semacam pengabaian hak pekerja ataupun tindakan tidak jujur dalam penerapan kewajiban.

Bisa disimpulkan kalau prinsip tauhid dalam ekonomi Islam tidak cuma bertabat teologis, namun pula jadi alas akhlak serta benar dalam membuat sistem ekonomi akan seimbang serta berkepanjangan. Pengabaian keatas nilai- nilai tauhid hendak berakibat langsung atas timbulnya aplikasi ekonomi akan tidak beradab serta tidak kemanusiaan, akan atas kesimpulannya mudarat seluruh pihak, paling utama para pekerja kecil semacam pegawai bercocok tanam.

2. Prinsip Adil

Dalam aplikasi prinsip seimbang dalam aplikasi pemberian imbalan pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah berjalan atas cara langsung serta bersumber atas perjanjian perkataan antara owner tanah serta pegawai, atas nominal imbalan akan dicocokkan buat tipe profesi, lama, serta Kerutinan lokal. Dalam aplikasi ditemui, owner tanah melaporkan kalau mereka membuatkan imbalan cocok atas kegiatan keras pegawai serta tidak menundanya. Tetapi, atas buatan pegawai, ada keluhan hal tidak terdapatnya standar imbalan akan nyata, dan besaran imbalan akan sedang dikira belum seluruhnya memantulkan kesamarataan paling utama dalam profesi akan menginginkan daya ekstra ataupun dicoba dalam situasi cuaca akan kurang berkawan.

Prinsip kesamarataan dalam pengupahan belum seluruhnya terealisasi di Nagari Taeh Baruah, Ketetapan hal besaran imbalan seluruhnya ditetapkan oleh owner tanah tanpa kalkulasi akan terukur ataupun konferensi akan sebanding. Tetapi di buatan lain, tidak terdapatnya standar senantiasa menimbulkan posisi pegawai dalam ikatan kegiatan jadi

lemas, sebab mereka tidak mempunyai lumayan energi payau buat membicarakan angka imbalan akan lebih seimbang.

Dalam ekonomi Islam, prinsip seimbang ialah angka utama akan wajib diaplikasikan dalam seluruh pandangan muamalah, tercantum sistem kegiatan serta pengupahan. Kesamarataan tidak cuma berarti membuatkan suatu cocok hak, namun pula menaruh orang atas posisi akan sebaiknya dalam sistem sosial serta ekonomi biar tercapainya penyeimbang sosial serta proteksi keatas pihak pegawai bercocok tanam atas cara ekonomi. Searah atas opini Yusuf al- Qaradawi, kesamarataan dalam pemberian imbalan tidak cuma menakutkan pandangan nominal, namun pula memegang format akhlak ialah hidmat keatas derajat serta upaya daya kegiatan..

Pemberian imbalan di Nagari Taeh Baruah memiliki faktor etiket serta kebaikan batin owner tanah, namun belum seluruhnya memantulkan prinsip kesamarataan begitu juga dituntut dalam ekonomi Islam. Ketidakteraturan dalam standar imbalan, tidak terdapatnya badan penanggung hak pegawai, dan kesenjangan posisi payau antara

pegawai serta owner tanah membuktikan kalau kesamarataan terkini berjalan atas tataran resmi serta belum memegang pandangan kesamarataan kata benda. Buat itu, dibutuhkan penguatan pemahaman beramai-ramai dan kebijaksanaan pengupahan berplatform nilai-nilai Islam akan bisa dijalani oleh penguasa nagari, badan adat, serta figur warga. Kesamarataan asli dalam sistem kegiatan cuma dapat terakbul bila ditopang oleh kebijaksanaan akan seimbang, pengawasan akan jelas, dan kesertaan warga akan berplatform angka agama serta manusiawi.

3. Prinsip Nubuwwah

Dalam aplikasi prinsip nubuwwah dalam aplikasi pemberian imbalan atas pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah, telah terdapatnya pemahaman akhlak dalam diri beberapa warga dalam menganggap pegawai atas bagus, ialah atas metode warga membuat imbalan langsung sehabis profesi berakhir selaku wujud apresiasi atas kegiatan keras pegawai, dan melindungi ikatan sosial akan serasi. Atas metode membuat imbalan atas cara langsung sehabis profesi berakhir, ini telah membuktikan tindakan nubuwwah

ialah“ Berikanlah imbalan pekerja saat sebelum keringat kering”(HR. Ibnu Majah) Hendak namun, terdapat pula beberapa warga belum melunasi imbalan atas cara langsung bila profesi telah berakhir digarap serta terdapat pula beberapa warga belum mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, perhatian, serta tanggung jawab sosial akan ialah inti atas prinsip nubuwwah belum nampak tidak berubah-ubah serta tertata dalam aplikasi imbalan.

Prinsip nubuwwah dalam ekonomi Islam menekankan atas format kebatinan serta etika akan berasal atas keteladanan para rasul, khususnya Rasul Muhammad SAW, dalam membuat aturan ekonomi akan seimbang serta bergengsi. Dalam kondisi ikatan kegiatan, prinsip ini melingkupi pandangan kejujuran dalam akad kegiatan, tepercaya dalam menunaikan hak pekerja, kasih cinta dalam menganggap pegawai, dan iman sosial akan tidak cuma memprioritaskan profit individu, namun pula keselamatan bersama.

Oleh sebab itu, butuh terdapatnya bimbingan balik serta penguatan pemahaman bersam-sama mengenai berartinya meneladani adab Rasulullah dalam berhubungan atas cara ekonomi,

spesialnya dalam pandangan kegiatan serta imbalan. Penguasa nagari, badan keimanan, dan figur adat butuh bersinergi buat memperkenalkan nilai-nilai nubuwuah atas cara lebih jelas dalam kedekatan sosial-ekonomi, supaya sistem kegiatan di Taeh Baruah betul-betul memantulkan ekonomi Islam akan berkeadilan serta bergengsi.

4. Prinsip Khalifa

Aplikasi prinsip khalifa dalam aplikasi pemberian imbalan pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah membuktikan terdapatnya ikatan kegiatan informal tanpa sistem pengawasan serta proteksi akan kokoh atas badan penguasa nagari ataupun daulat resmi akan lain. Cara pengupahan beberapa besar dicoba bersumber atas perjanjian individu antara owner tanah serta pegawai, atas standar imbalan akan didasarkan atas Kerutinan lokal ataupun konferensi simpel. Tidak terdapat regulasi tercatat ataupun badan pengatur akan atas cara aktif membenarkan kesamarataan, akurasi durasi pembayaran, ataupun kelayakan nominal imbalan.

Lemahnya kedudukan bentuk rezim lokal dalam menata serta memantau ikatan kegiatan pertanian,

sementara itu dalam prinsip ekonomi Islam, guna khalifah melingkupi tanggung jawab sistemis buat melempangkan kesamarataan, keselamatan sosial, serta proteksi keatas golongan rentan, tercantum pegawai. Prinsip khalifah tidak cuma berdialog pertanyaan kepemimpinan kebatinan, namun pula hal pengurusan pangkal energi, kebijaksanaan ekonomi akan berkeadilan, dan penyaluran hasil akan seatasn serta kemanusiaan.

begitu juga dipaparkan oleh Chapra, guna penguasa dalam ekonomi Islam merupakan buat membetulkan ketidak seimbangan pasar lewat campur tangan akan seimbang serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga, spesialnya mereka akan lemas atas cara ekonomi. Dalam situasi semacam ini, penguasa nagari sepatutnya jadi bintang film aktif dalam meningkatkan prinsip kegiatan pertanian, membuat standar pengupahan minimal akan seimbang, dan membuat forum perantaraan antara owner tanah serta pegawai buat menjauhi aplikasi kegiatan akan eksploitatif.

Atas buatan donatur kegiatan (owner tanah), memanglah ada itikad bagus semacam membuatkan imbalan pas durasi serta memikirkan bobot

kegiatan pegawai. Tetapi, tanpa bimbingan atas penguasa, kebijaksanaan ini bertabiat tidak menyeluruh serta amat individual. Sedangkan atas buatan pegawai, mereka tidak mempunyai posisi payau akan kokoh buat menuntut hak akan lebih bagus sebab kehabisan proteksi resmi. Kesenjangan kedekatan ini sesungguhnya dapat diminimalisasi bila penguasa dusun melaksanakan kedudukannya selaku delegasi prinsip khalifah, ialah jadi regulator serta penjaga kesamarataan sosial.

Prinsip khalifah pula bertanggung jawab serta keikutsertaan dalam pembangunan warga. Oleh sebab itu, pemberian imbalan akan seimbang bukan cuma pertanyaan bisnis ekonomi, namun buatan atas tepercaya sosial akan wajib dilindungi. Penguasa nagari mempunyai tanggung jawab buat memperkenalkan sistem kegiatan akan menjunjung besar kesamarataan, kesetaraan, serta keselamatan begitu juga prinsip maqasid al- shar' iah akan jadi bawah dalam pembangunan ekonomi Islam.

Dalam aplikasi pemberian imbalan di Nagari Taeh Baruah cendrung berjalan lewat metode informal akan mengandlakan ikatan

individu anantara owner tanah atas pegawai, tanpa kerangka kelembagaan akan kokoh. Perihal ini membawa alamat kalau guna khalifah selaku prinsip bawah rezim dalam ekonomi Islam belum dijalani atas cara maksimal di tingkatan nagari, paling utama dalam pandangan proteksi pegawai bercocok tanam. Hingga atas itu, penguatan kedudukan penguasa nagari amat berarti dalam membuat ekosistem kegiatan akan seimbang serta cocok atas nilai- nilai Islam lewat regulasi, bimbingan, serta pengawasan akan membela atas kesamarataan sosial.

5. Prinsip tanggung jawab

Aplikasi prinsip tanggung jawab dalam aplikasi pemberian imbalan atas pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah telah terdapat beberapa owner tanah mempraktikkan prinsip tanggung jawab dalam pemeberian imbalan. owner tanah merasa atas cara individu bertanggung jawab buat membuatkan imbalan atas cara langsung sehabis profesi berakhir, selaku wujud apresiasi atas pelayanan pegawai serta buat melindungi ikatan bagus. Walaupun sedemikian itu, tanggung jawab ini lebih bertabiat akhlak serta perseorangan, belum

terlembaga ataupun berplatform sistem.

Beberapa owner tanah melaporkan kalau mereka merasa bertanggung jawab buat membuat imbalan akan pantas sebab siuman pegawai memercayakan hasil kegiatan setiap hari buat penuhi keinginan hidup. Di buatan lain, pegawai tidak mempunyai agunan ataupun metode aduan bila terjalin keterlambatan ataupun ketidak sesuaian dalam pembayaran imbalan. Ini membuktikan kalau tanggung jawab sosial belum diiringi atas sistem akan sanggup membenarkan keberlanjutan serta kesamarataan buat pihakburuh bercocok tanam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip tanggung jawab menuntut tiap pelakon ekonomi bagus orang ataupun institusi buat berperan atas cara jujur, seimbang, serta mencermati keselamatan pihak lain. Seseorang tuan ataupun owner modal mempunyai tanggung jawab akhlak serta hukum buat menunaikan hak- hak pekerja atas cara pas, tidak menahan- nahan pembayaran, serta membenarkan kalau pekerja diperlakukan atas cara kemanusiaan. Rasulullah SAW berfirman:“ Berikanlah imbalan atas pekerja saat sebelum keringatnya

kering.”(HR. Ibnu Majah) Perkataan nabi ini tidak cuma menekankan akurasi durasi dalam pembayaran, namun pula melukiskan urgensi tanggung jawab selaku tepercaya akan wajib dilindungi oleh pihak akan memperkerjakan. Dalam kondisi ini, tanggung jawab bukan cuma perkara teknis, namun menakankut adab serta integritas dalam kedekatan ekonomi.

Pemberian imbalan di Nagari Taeh Baruah memantulkan terdapatnya pemahaman tanggung jawab orang atas beberapa owner tanah, paling utama dalam perihal akurasi durasi pembayaran serta perlakuan akan kemanusiaan atas pegawai. Tetapi begitu, prinsip tanggung jawab dalam wujud sistemik serta sistemis belum terkabul, alhasil hak pegawai sedang amat terkait atas karakter donatur kegiatan.

biar prinsip tanggung jawab dalam ekonomi Islam bisa diaplikasikan atas cara utuh di Nagari Taeh Baruah dibutuhkannya: Regulasi pengupahan akan nyata di tingkatan nagari, selaku wujud tanggung jawab beramai- ramai, Pengawasan atas badan sosial ataupun adat buat menjamin hak- hak pegawai aman, Kenaikan bimbingan mengenai nilai- nilai Islam

dalam kegiatan, alhasil tanggung jawab tidak cuma diamati selaku bobot, namun selaku buatan atas ibadah serta kesamarataan sosial. Atas begitu, aplikasi prinsip tanggung jawab tidak cuma hendak tingkatkan keselamatan pegawai, namun pula menghasilkan sistem kegiatan akan serasi serta diridhai Allah SWT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bersumber atas hasil riset hal sistem imbalan pegawai bercocok tanam di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 5 Puluh Kota, bisa disimpulkan kalau aplikasi pengupahan akan legal sedang mengalami bermacam kasus. Di antara lain merupakan keterlambatan dalam pembayaran imbalan sampai 2 bulan sehabis profesi berakhir, nominal imbalan akan tidak cocok atas keinginan hidup, dan minimnya kejernihan serta kejelasan dalam perjanjian antara pegawai bercocok tanam serta owner tanah. Perihal ini berakibat langsung keatas keselamatan pegawai bercocok tanam, akan atas kesimpulannya bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi di tingkatan lokal.

Bersumber atas perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan akan legal belum seluruhnya memantulkan nilai- nilai syariah. Prinsip- prinsip kesamarataan(‘ adl), berkecukupan(kifayah), kejelasan akad(

wudhuuhul‘ aqdi), serta pantangan pemanfaatan(zulm) belum terakbul atas cara maksimum. Janji pembayaran imbalan serta rendahnya angka ganti rugi keatas kegiatan keras pegawai bercocok tanam ialah wujud ketidakadilan akan dikritik dalam Islam. Islam memandang pekerja selaku orang akan mempunyai hak atas keselamatan hidup akan pantas, alhasil pemberian imbalan wajib dilaksanakan atas cara kemanusiaan, seimbang, serta pas durasi. Oleh sebab itu, sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi islam tidak menekankan pandangan teknis pembayaran, namun pula menjunjung besar angka manusiawi serta penyeimbang sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiti Nurjanah sistem Pengupahan Pegawai bercocok tanam Bersumber atas Prinsip Kesamarataan Serta Kelayakan(riset permasalahan dusun Bongkot Kecamatan asiluwih Kabupaten Pringsewu) tahun 2021
- Endah Masrunik Tata cara Pengupahan Pegawai Petik Kopi(riset permasalahan Pegawai Kopi di dusun Resapombo) vol 14, nomor 2 tahun 2020
- Lukman Juri imbalan daya kegiatan atas upaya antah perpektif islam kecamatan pujut kabupaten lombok tengah Vol. 6 Nomor. 1 Tahun 2025

Nuraini, analisa sistem ujah pegawai bercocok tanam antah riset permasalahan Gampong Mon Kiara Kecamatan Montasik kabupaten Aceh besar bol. 4, nomor 2 tahun 2023

Muhammad Syarul Hidayat meninjau imbalan pegawai bercocok tanam dalam perpektif ekonomi islam: riset kualitatif mengenai kesamarataan serta kesajateraan Vol. 2 Nomor. 3 Tahun 2023

Muhammad Ismail Yusanto serta Muhammad Karebet Widjayakusuma, Menggagas Bidang usaha Islam(Jakarta Dengung Insani, 2002). Perihal 201

Rizqa Amelia, dkk imbalan kejar dalam perspektif islam vol. 2 Nomor 2 tahun 2023

Ruslam Abdul Ghofur, Rancangan Imbalan Dalam Ekonomi Islam, Arjasa Pratama, tahun 2020 perihal 18

Saprida M. H. I asal usul pandangan ekonomi islam, jakarta, tahun 2021 perihal 4- 5

Yetniwati, pengaturan imbalan bersumber atas atas prinsip kesamarataan, daya muat 29, no 1, tahun 2020

Yuni hidayatun analisa rancangan islam adat-istiadat imbalan pegawai bercocok tanam(riset permasalahan desa mandigu suco kabupaten jembar) vol. 05 nomor. 01 tahun 2019 perihal 87